

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua tahun anggaran 2014-2018 yang diukur melalui rasio *share*, rasio *growth*, dan peta kemampuan keuangan *share and growth*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio *Share*

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua menunjukkan kinerja keuangan yang belum baik, dimana peran PAD dalam membiayai Belanja Daerah masih sangat minim. Nilai *share* yang dimiliki seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua termasuk dalam kategori sangat rendah, yakni dengan hasil rata-rata masing-masing sebesar 8,7% dan 3,2%. Nilai tersebut juga masih berfluktuasi dan belum dapat meningkat dengan stabil setiap tahunnya. Dengan hasil tersebut, dapat diartikan pula bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua, memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.

2. Rasio *Growth*

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua menunjukkan kinerja keuangan yang belum baik, dimana pertumbuhan PAD masih belum dapat tumbuh positif dengan stabil. Nilai *growth* yang dimiliki seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua termasuk dalam kategori sedang, yakni dengan rata-rata masing-masing sebesar 27,1% dan 35,7%, dengan kecenderungan terjadinya penurunan dari tahun ketahun. Dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh

dan Papua, masih belum dapat menjaga pertumbuhan PAD-nya dengan mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimilikinya.

3. Peta Kemampuan Keuangan *Share and Growth*

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua, menunjukkan kinerja yang belum baik. Dari sejumlah 52 pemerintah daerah di Provinsi Aceh dan Papua, hanya terdapat tujuh daerah yang berada dalam Kuadran II atau sebesar 11,5%, sedangkan sisanya sebesar 88,5% atau sejumlah 45 daerah berada dalam kuadran IV. Sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua memiliki kondisi keuangan terburuk, dengan kontribusi PAD yang rendah dalam membiayai Belanja Daerah, dan daerah juga belum mempunyai kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua pada tahun anggaran 2014-2018, berikut adalah beberapa saran yang penulis harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat.

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh dan Papua
Diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima saat ini, untuk meningkatkan kualitas SDM lokal dan menyediakan fasilitas yang berkualitas serta terjangkau sebagai penunjang pelaksanaan otonomi kedepannya. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengelola penerimaan daerahnya dengan asas keadilan dan pemerataan sehingga setiap daerah yang bahkan sulit dijangkau, dapat memiliki peluang dan dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun untuk peningkatan PAD, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi perusahaan daerah yang sudah ada, atau dapat melakukan ekstensifikasi dengan membangun perusahaan daerah yang mampu mengelola potensi daerah sehingga hasilnya dapat menjadi sumber penerimaan baru daerah.

Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat mengimbangi daya tarik SDA yang dimiliki daerah-daerah tersebut dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan kemitraan yang selain dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun juga disisi lain dapat meningkatkan kompetensi dan taraf hidup masyarakat setempat tanpa merusak ekosistem lingkungan hidup daerah tersebut. Kreativitas daerah untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah tentu sangat diharapkan, namun konsistensi dan kredibilitas daerah dalam mengelola keuangan yang diamanatkan untuk kepentingan masyarakat, juga sangat penting untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah kedepannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan keterbatasan aspek yang diukur, objek penelitian, serta parameter analisis yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan dan menjadi dorongan untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam dan tajam lagi terkait pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah